



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI SANKSI DISIPLIN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003  
TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA DI  
POLRES KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh ::

**Wahyu Bagus Saputro**

**NPM 221003742019489**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI SANKSI DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 2 TAHUN 2003 TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA  
DI POLRES KENDAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

WAHYU BAGUS SAPUTRO  
NPM : 221003742019489

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH  
NUPTK : 3241741642230113

Anggota,

DR. SRI RETNO WIDYORINI, SH., MHUM  
NUPTK : 2260741642230063

Anggota,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.  
NUPTK : 5536768669130312

Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## ABSTRAK

Penerapan disiplin merupakan aspek penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menjadi dasar hukum dalam penegakan disiplin, termasuk terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana di Polres Kendal, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi disiplin di Polres Kendal telah dilaksanakan secara sistematis melalui sosialisasi peraturan, pengawasan internal oleh fungsi Profesi dan Pengamanan, serta mekanisme penjatuhan sanksi oleh atasan yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan disiplin dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan mendeteksi pelanggaran, perbedaan tingkat kesadaran disiplin antaranggota, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Kendal melakukan upaya penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi, serta pembinaan dan internalisasi nilai etika profesi Polri. Kata kunci: sanksi disiplin, anggota Polri, tindak pidana, PP Nomor 2 Tahun 2003, Polres Kendal.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I</b> .....	9
<b>PENDAHULUAN</b> .....	9
A. Latar Belakang Masalah .....	9
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b> .....	19
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	19
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	19
2. Kedudukan Polri sebagai Alat Negara .....	19
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polri .....	20
4. Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	21
B. Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	21
1. Pengertian Disiplin Anggota Polri .....	21
2. Disiplin sebagai Norma Hukum Internal .....	22
3. Disiplin sebagai Instrumen Pembinaan Anggota .....	23
4. Tujuan dan Prinsip Penegakan Disiplin Polri .....	24
5. Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Anggota Polri .....	25
C. Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 .....	25
1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ...	25
2. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003	26
3. Jenis dan Bentuk Sanksi Disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003	27
4. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Anggota Polri .....	28
D. Landasan Teoretis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.....	29
<b>BAB III</b> .....	33
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33

A. Tipe Penelitian .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV</b> .....	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Polres Kendal .....	38
B. Implementasi Sanksi Disiplin Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri di Polres Kendal.....	48
C. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres Kendal .....	53
D. Hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres Kendal.....	67
<b>BAB V</b> .....	<b>75</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>82</b>